

**SIARAN PERS**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



---

**PENYERAHAN LKPD *UNAUDITED* TA 2020,  
LHP ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TA 2020, DAN  
IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH (IHPD)  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

Pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2020, pukul 13.30 WIB, tiga belas Pemerintah Daerah secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020 (*unaudited*) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara daring. Pemerintah Daerah tersebut adalah Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Lamandau, Pemkab Sukamara, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Pulang Pisau, Pemkab Kapuas, Pemkab Murung Raya, Pemkab Katingan, Pemkab Barito Utara, Pemkab Barito Selatan, dan Pemkab Barito Timur. LKPD disampaikan oleh Kepala Daerah atau yang mewakili melalui email dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana. Laporan yang disampaikan terdiri dari 7 (tujuh) jenis, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah didampingi oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut, setelah dilakukannya penyerahan LKPD TA 2020 (*unaudited*), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan LHP atas Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari APBD TA 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Kepala Daerah menerima laporan dalam bentuk softcopy melalui email yang disampaikan BPK dan akan dilakukan pengiriman hardcopy laporan dalam kesempatan berikutnya.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir, Pemerintah Daerah mengalami perkembangan yang baik/peningkatan dalam pencapaian opini atas LKPD walaupun ada beberapa yang mengalami penurunan opini namun segera dilakukan perbaikan untuk peningkatan opini kembali. Hal ini menunjukkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. BPK mengharapkan Pemerintah Daerah segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya khususnya

---

**Informasi Lebih Lanjut**

**Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

**BPK Perwakilan Kota Palangkaraya**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

**SIARAN PERS**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



yang bisa berdampak pada penyajian Laporan Keuangan, seperti temuan terkait pengelolaan aset tetap. Selain itu, untuk TA 2020 semoga tidak ada masalah signifikan yang dapat mengganggu opini, khususnya terkait refocusing dan realokasi anggaran serta proses pilkada. Pemeriksaan atas LKPD ini bertujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria.

Pada bulan Maret 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2020 pada partai politik penerima bantuan di 15 wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. BPK melakukan pemeriksaan atas 146 LPJ Banparpol TA 2020 se Provinsi Kalimantan Tengah dengan total nilai bantuan sebesar Rp12,15 miliar dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp12,24 miliar dengan hasil kesimpulan sebagai berikut.

1. Sesuai, sebanyak 99 LPJ partai politik (67,81%);
2. Sesuai dengan pengecualian, sebanyak 44 LPJ partai politik (30,14%)
3. Tidak sesuai, sebanyak 3 LPJ partai politik (2,05%).

LPJ Banparpol TA 2020 untuk partai politik di Kab Seruyan dan Kab Sukamara seluruhnya memperoleh kesimpulan sesuai (100%). Sedangkan berdasarkan partai politik yang memperoleh Banparpol TA 2020, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di wilayah Provinsi Kalteng telah mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan Banparpol TA 2020 dengan kesimpulan sesuai (100%). Beberapa permasalahan yang masih terjadi diantaranya adalah

1. Bukti LPJ Banparpol tidak lengkap dan tidak sah, sebagai contoh :
  - a. Tidak adanya bukti pengeluaran dari pihak eksternal,
  - b. Tidak adanya pengesahan atas bukti pengeluaran dari pihak yang berwenang,
  - c. Bukti pertanggungjawaban kurang dari yang telah dilaporkan dalam LPJ
2. Penggunaan dana banparpol tidak sesuai prioritas (% penggunaan dana untuk pendidikan politik lebih kecil dibandingkan untuk operasional sekretariat)

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18, setiap semester BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada DPR, DPRD, Presiden, dan Kepala Daerah. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). IHPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 memuat ringkasan dari 21 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 15 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 2 LHP PDDT. Selain itu juga IHPD

---

**Informasi Lebih Lanjut**

**Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

**BPK Perwakilan Kota Palangkaraya**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

**SIARAN PERS**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



memuat ringkasan 154 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dari APBD, pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam 21 LHP, BPK mengungkapkan 246 temuan pemeriksaan yang memuat 358 permasalahan sebesar Rp43.944.458.864,81, yang meliputi:

1. 154 (43%) permasalahan kelemahan SPI;
2. 168 (47%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp43.448.985.682,99; dan
3. 36 (10%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp495,47 Juta.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp17.999.482.145,76 (41%).

Pada Semester I Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 pada 15 Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Tengah, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk seluruh LKPD TA 2019 tersebut. Meskipun telah memperoleh opini WTP, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Pengelolaan aset tetap dan persediaan belum sepenuhnya memadai;
2. Pengelolaan dan penatausahaan kas belum sepenuhnya memadai;
3. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian kualitas dalam pengadaan barang/jasa, khususnya terkait pekerjaan fisik dan jasa konsultasi yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran;
4. Penyimpangan terhadap peraturan perundangan terkait pengelolaan BMD.

Pada semester II Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait penanganan pandemi COVID-19. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Sasaran pemeriksaan meliputi proses pengujian (testing), pengelolaan atas penelusuran kasus (tracing), perawatan (treatment) dan edukasi serta sosialisasi/komunikasi dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 pada keempat pemerintah daerah tersebut telah **cukup efektif**, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut.

1. Upaya testing, permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu:

---

**Informasi Lebih Lanjut**

**Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

**BPK Perwakilan Kota Palangkaraya**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- a. Pemda belum memiliki rencana operasi untuk memastikan pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium kurang dari 1 x 24 jam; 2) memastikan laboratorium jejaring mampu pengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3 x 24 jam dan meminimalisir kerusakan spesimen;
  - b. Sebagian besar entitas belum memiliki laboratorium yang memenuhi standar BSL-2;
  - c. Penginputan data spesimen belum tertib sehingga masih terdapat perbedaan dengan data di *All Record*; dan
2. Upaya *tracing*, permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu:
- a. Upaya penemuan kasus secara aktif dan secara pasif belum optimal karena kurang dibarengi tindakan lanjutan yang memadai;
  - b. Pencatatan dan pelaporan data penemuan kasus secara aktif belum tertib, sehingga masih terjadi perbedaan data antara sistem online pelaporan harian COVID-19 dengan PHEOC;
  - c. Pemda memiliki keterbatasan SDM baik jumlah dan kompetensi dalam melakukan upaya penemuan kasus secara aktif dan pasif.
3. Upaya *treatment*, permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu:
- a. Penunjukan dan penetapan rumah sakit rujukan COVID-19 belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan rumah sakit tersebut;
  - b. Sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan BMHP untuk kegiatan *treatment* belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan;
  - c. Tenaga kesehatan belum mencukupi untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 dan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
4. Upaya edukasi dan sosialisasi, permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu:
- a. Pemerintah Provinsi Kalteng belum memiliki perencanaan strategis terkait komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan COVID-19 yang komprehensif;
  - b. Upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal serta belum tersedia perencanaan strategis dan pelaksanaan koordinasi dengan APH.
  - c. Pemda belum memiliki strategi khusus terkait sosialisasi dan pelaksanaan regulasi yang mengatur keharusan tempat umum melengkapi tanda-tanda protokol kesehatan dan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar social engineering.

Sedangkan PDTT dilaksanakan untuk menilai kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada dua entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kab Murung Raya, dengan sasaran pemeriksaan antara lain 1) refocusing dan realokasi APBD; 2) penanganan bidang kesehatan, termasuk sumbangan pihak ketiga; 3) penanganan bidang sosial, termasuk sumbangan

---

### Informasi Lebih Lanjut

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Kota Palangkaraya

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

**SIARAN PERS**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



---

pihak ketiga; dan 4) penanganan dampak ekonomi. Beberapa temuan signifikan yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian adalah.

1. Kelebihan pembayaran pada pengadaan barang dan jasa sebesar Rp636.627.458,74 dan pajak belum disetor sebesar Rp223.567.014,50;
2. Pemborosan dan kelebihan pembayaran belanja insentif tenaga kesehatan masing-masing sebesar Rp599.109.545,82
3. Pengelolaan data DTKS dan non DTKS belum dapat diyakini validitasnya;
4. Refocusing dan realokasi APBD, pengelolaan sumbangan pihak ketiga, dan penanganan dampak ekonomi dalam penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

---

**Informasi Lebih Lanjut**  
**Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**  
**BPK Perwakilan Kota Palangkaraya**  
**Telp: (0536) 3241118**  
**Email: palangkaraya@bpk.go.id**